

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa, bank memegang peranan yang cukup penting dalam lalu lintas keuangan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting untuk mengatur, menghimpun dan menyalurkan dana dibutuhkan untuk membiayai kegiatan – kegiatan ekonomi yang ada. Salah satu cara yaitu dengan menyalurkan dana dalam bentuk kredit untuk membantu para pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar yang membutuhkan dana dengan asumsi pemberian kredit dapat meningkatkan pendapatan. Lemahnya permodalan pelaku usaha telah disadari oleh pemerintah dan akhirnya terdorong untuk meluncurkan beberapa program kredit modal usaha.

Oleh karena itu sebagai lembaga intermediasi, bank juga akan berupaya memaksimalkan penyaluran kreditnya karena selain mensejahterakan masyarakat, bank juga akan mendapatkan laba yang merupakan sumber utama pendapatannya. Sistem perkreditan modal usaha merupakan salah satu sumber pendanaan yang diberikan oleh jasa perbankan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Adapun jasa yang diberikan oleh perbankan adalah dengan memberikan fasilitas kredit seperti kredit program pemerintah, kredit investasi, kredit konsumsi, kredit ekspor dan kredit modal kerja.

Pihak bank terus mengembangkan kompetensi di bidang kredit untuk menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan (Abdullah,

2007). Namun pada kenyataannya fungsi bank tersebut belum sepenuhnya tercapai, kualitas kredit yang disalurkan pertumbuhannya rendah khususnya kredit investasi, pertumbuhan kredit untuk kegiatan produktif yaitu modal kerja dan investasi yang sifatnya jangka panjang tumbuh lebih rendah dibandingkan kredit konsumsi. Menurut Bappenas (2005), pertumbuhan kredit yang rendah ini disebabkan oleh : 1) sifat sumber pendanaannya yang sebagian jangka pendek; 2) ketatnya peraturan BI dalam memberikan kredit; 3) perbankan umumnya dalam kondisi konsolidasi dan 4) masih tingginya resiko di sektor riil dan adanya *assymetric information* tentang kondisi perusahaan.

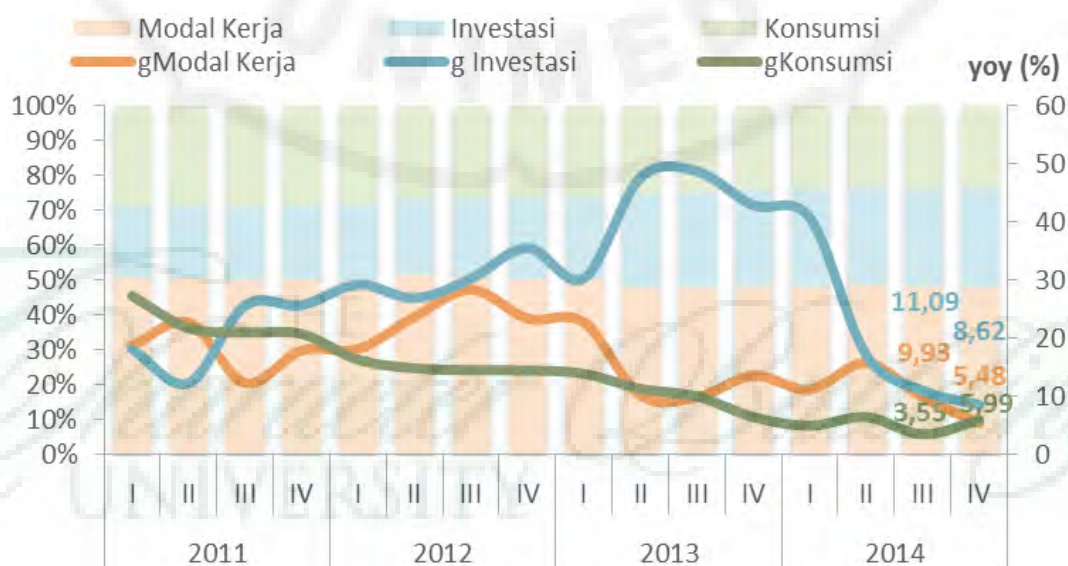
Laporan Bank Indonesia (2003) menyebutkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan tersebut disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum mempunyai sektor riil menyerap kredit. Sektor riil sendiri belum mampu menyerap kredit karena terjadinya *credit crunch*. *Credit crunch* disebabkan kurangnya keinginan perbankan menyalurkan kredit sehingga kebijakan moneter menjadi relatif longgar, keadaan ini menyebabkan kredit tidak dapat ditransmisikan oleh sektor riil melalui pemberian pinjaman. *Credit crunch* juga dapat mengurangi ruang gerak bagi kebijakan moneter, karena dalam kondisi tersebut kebijakan moneter untuk menaikkan suku bunga akan memperburuk kondisi dunia usaha.

Jumlah permintaan kredit pada suatu bank dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi debitur (dunia usaha) maupun dari sisi kreditur (perbankan) itu sendiri. Permintaan kredit dari sisi debitur (dunia usaha) dipengaruhi oleh

adanya upaya untuk meningkatkan aktivitas usaha, baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja. Pemberian kredit perbankan yang sepenuhnya diperoleh dari sumber dana masyarakat dan dipergunakan untuk kegiatan perekonomian.

Kredit modal kerja digunakan untuk pengadaan bahan baku, bahan pembantu persediaan barang dan jasa. Pengadaan ini selanjutnya akan membantu pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang akan dijual kembali untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Berbeda dengan kredit konsumsi, kredit konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Pengembalian kredit ini bersumber dari pendapatan masyarakat berupa gaji, honorarium dan sebagainya. Selanjutnya jika dibandingkan dengan kredit investasi, fokus dari kegiatan ini adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan mesin-mesin dan peralatan berat untuk membangun pabrik atau industri.

Berdasarkan data dari BI dari tahun 2011 sampai tahun 2014 pertumbuhan kredit dapat ditunjukkan pada gambar 1.1 dibawah ini:



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.1 Pertumbuhan Kredit Menurut Penggunaan

Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan kredit modal kerja pada triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga tahun 2012 dan pada triwulan kedua sampai kuartal keempat tahun 2014 terjadi perlambatan pertumbuhan pada kredit modal kerja dan kredit investasi, sebaliknya kredit konsumsi masih tumbuh positif dari 3,55% (yoy) ke 5,99 (yoy). Gambar 1.1 di atas menunjukkan peningkatan kredit konsumsi diduga karena adanya peningkatan konsumsi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

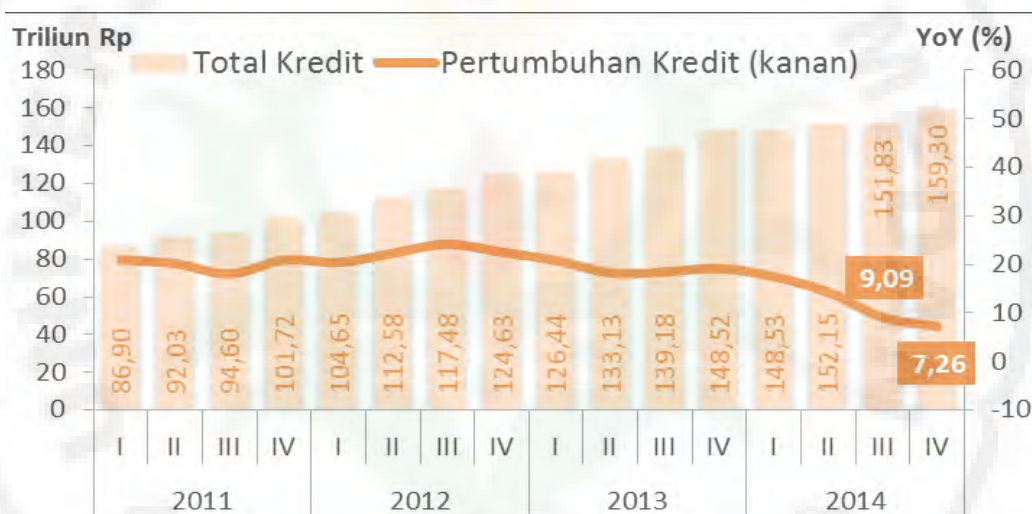
Untuk penyaluran kredit, pada triwulan keempat 2014, perbankan telah menyalurkan kredit sebesar Rp 166,88 triliun, tumbuh 6,97% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 8,67% (yoy). Kenaikan BI rate sebagai langkah Bank Indonesia dalam meredam laju inflasi pada pertengahan November 2014, tampaknya juga direspon oleh perbankan dengan menaikkan suku bunga. Hingga akhir triwulan laporan, suku bunga kredit justru mengalami peningkatan dari 11,31% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 11,84% (yoy) pada triwulan laporan (Gambar 1.2).



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.2. Suku Bunga, BI Rate dan Kredit di Sumatera Utara

Fenomena pertumbuhan kredit pada bank swasta (konvensional) di Sumatera Utara sejak kuartal keempat tahun 2013 sampai dengan kuartal keempat tahun 2014 mengalami perlambatan penyaluran kredit/pembiayaan. Hingga akhir triwulan keempat 2014, posisi kredit perbankan konvensional tercatat sebesar Rp 159,3 triliun, tumbuh melambat dari 9,09% (yoy) di triwulan lalu menjadi 7,26%. Pertumbuhan kredit pada bank swasta dapat kita lihat dari Gambar 1.3 berikut.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.3 Pertumbuhan Kredit Bank Konvensional (Swasta)

Gambar 1.3 menunjukkan pertumbuhan kredit pada Bank Konvensional (swasta) dari tahun 2011 hingga 2014 yang cenderung menurun. Tahun 2011 pada triwulan I, tercatat pertumbuhan kredit sebesar Rp. 86,90 triliun dan mencapai pertumbuhan maksimal pada tahun 2012 triwulan III yang sebesar Rp. 117,48 triliun. Hingga akhir tahun 2014, pertumbuhan kredit bank konvensional (swasta) tumbuh menjadi sebesar Rp. 159,30 triliun.

Sebagai upaya dalam mendorong perekonomian Nasional, BI sebagai lembaga otoritas moneter akan memberikan sinyal untuk menurunkan suku bunga secara bertahap. Penurunan suku bunga sebagai instrumen moneter yang salah

satunya adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diharapkan semakin mendorong perekonomian dengan menurunkan suku bunga. (Hermanta dan Ekananda, 2005).

Suku bunga kredit pada saat ini dianggap beberapa kalangan baik dari pelaku bisnis maupun pakar ekonomi belum optimal. Masih relatif tingginya suku bunga kredit ditengah masih adanya ketidakpastian prospek usaha tentu saja akan mengurangi semangat sektor dunia usaha untuk berinvestasi. Gejolak suku bunga dan inflasi menjadi dua faktor penting yang mempengaruhi aktifitas penyaluran kredit. Keduanya tidak hanya mendorong suku bunga kredit, tapi juga membuat resiko kredit macet menjadi besar. (Info Bank, 2005).

Boyd et, al (2001) dalam Hung (2001) menyatakan bahwa inflasi akan menyebabkan kenaikan harga yang berdampak ada turunnya nilai riil uang dan daya beli, sehingga bagi masyarakat berpenghasilan tetap, permintaan akan barang dan jasa menurun. Kondisi ini membuat pelaku ekonomi mengurangi tingkat produksinya. Berkurangnya produksi mengakibatkan pinjaman kepada perbankan juga menurun karena kondisi dunia usaha yang melemah. Inflasi mendorong pelaku ekonomi mengurangi investasi sehingga penyaluran kredit mengalami penurunan.

Bank sebagai lembaga intermediasi berpartisipasi sebagai penyandang dana dalam bentuk kredit bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya, baik secara langsung maupun tidak langsung menunjang pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang diukur dengan PDB/ PDRB. Peningkatan pertumbuhan PDB/ PDRB juga dapat dijadikan indikator bagi perbankan dalam penyaluran kredit, sehingga pertumbuhan tetap terjaga (Suta dan Musa, 2003)

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB perkapita Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar 25,41 juta rupiah meningkat menjadi 38,05 juta rupiah pada tahun 2014. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan atas dasar harga berlaku, rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar 10,62 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 mencapai 12,22 persen. Adapun PDRB perkapita Sumatera Utara berdasarkan harga berlaku pada tahun 2014 mencapai 38,05 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan, pertumbuhan PDRB perkapita sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami perlambatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi ini. Tahun 2011 PDRB perkapita Sumatera Utara tumbuh 5,11 persen sedangkan tahun 2014 tumbuh sebesar 3,88 persen.

Tabel 1.1. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	25.412,07	-	25.412,07	-
2011	28.518,19	12,22	26.711,24	5,11
2012	31.109,35	9,09	28.036,88	4,96
2013*	34.599,95	11,22	29.343,04	4,66
2014**	38.045,85	9,96	30.482,59	3,88

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indikator lain yang dianggap mempengaruhi permintaan kredit adalah tingkat inflasi. Menurut Boyd et, al (2001) dalam Hung (2001), Kenaikan harga yang disebabkan inflasi akan menurunkan nilai riil uang dan daya beli, sehingga permintaan akan barang dan jasa menurun. Kondisi ini akan membuat pelaku ekonomi mengurangi tingkat produksinya yang berdampak pada pinjaman kepada perbankan juga menurun karena kondisi dunia usaha yang melemah. Inflasi mendorong pelaku ekonomi mengurangi investasi sehingga penyaluran kredit mengalami penurunan.

Perkembangan laju inflasi Sumatera Utara selama tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 1.4.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4. Laju Inflasi Sumatera Utara

Tabel 1.4 menunjukkan tingkat inflasi di Sumatera Utara pada tahun 2010 mencapai angka 8 persen dan menurun pada tahun 2011 dan 2012 di angka 3 persen. Kondisi ini menunjukkan ketidakstabilan harga barang dan jasa dalam perekonomian dan kondisi ketidakstabilan harga juga ditunjukkan dengan

meningkatnya inflasi di tahun 2013 menjadi sebesar 10,18 persen dan kembali turun menjadi sebesar 8,17 persen di tahun 2014.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan diatas, diketahui masih banyak hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh khususnya mengenai kesenjangan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada bank swasta di Sumatera Utara. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Permintaan Kredit Modal Usaha Pada Bank Swasta di Propinsi Sumatera Utara” .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh suku bunga kredit, IHK dan PDRB terhadap permintaan kredit modal usaha di Provinsi Sumatera Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, suku bunga kredit, IHK dan PDRB terhadap permintaan kredit modal usaha di Sumatera Utara.

1.4 . Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perbankan di Sumatera Utara dan pemerintah dalam rangka pemberian kredit kepada pelaku usaha di Sumatera Utara.

2. Sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti di bidang perkreditan di Sumatera Utara.
3. Sebagai informasi ilmiah dan menambah wawasan bagi peneliti tentang konsep permintaan kredit perbankan di Sumatera Utara.



THE
Character Building
UNIVERSITY